

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai Tupoksinya.

Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin dipedesaan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kalimantan Tengah dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu kepada Program Nasional dan Program Daerah.

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah serta menyelaraskan antara rancangan program dengan kegiatan diperlukan suatu acuan Rencana Kerja (RENJA). Untuk mendorong agar pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berorientasi pada upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan yang baik (Good Service) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah, maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan upaya efektif Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang lebih terfokus pada penanganan isu strategis yang mengemuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya berfungsi sebagai dokumen rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum rencana kerja sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan Nasional adalah "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat";
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;

1.3.Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

- (1) Merumuskan arah Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kalimantan Tengah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Merupakan rujukan arah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun;
- (3) Merupakan rujukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun.

1.4.Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisikan uraian mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja, Sistematika Penulisan.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017

Berisikan uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan uraian tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019.

Bab V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Tahun 2017 dari dana DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana sebesar Rp. 16.394.805.174,- yang telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 15.139.139.860,- atau 92,34 % sedangkan realisasi fisiknya sebesar 94,82 %. Realisasi anggaran yang belum mencapai 100%, hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut : 1) terdapatnya sisa dana untuk pembayaran gaji pegawai yang cukup besar nilainya, 2) terdapat sisa perjalanan dinas, 3) terdapat sisa dana yang tidak bisa digunakan lagi dan 4) terdapat kegiatan yang belum sempat dilaksanakan.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kode						Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalannya Dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%)		
1	2						4	5		6		7		8		9		10		11		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	1						Urusan Wajib															
	1						Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
	1	22	01				Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa															
1	1	22	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			14.770.042.000,-	1.979.424.190,-		2.954.008.400,-		2.851.820.491,-				4.831.244.681,-			
	1	22	01	01	01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat yg dikeluarkan	7.000	63.575.000,-	1.400	12.560.000,-	1.400	12.715.000,-	1.400	12.715.000,-	100	96,60	2.800	24.843.000,-	40,00	39,08
	1	22	01	01	02	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran biaya rek. telp, listrik dan air	25	1.184.000.000,-	5	156.153.407,-	5	236.800.000,-	5	236.800.000,-	100	83,29	10	353.383.367,-	40,00	29,85
	1	22	01	01	05	1	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Asuransi gedung kantor	5	100.000.000,-	1	17.426.345,-	1	20.000.000,-	1	20.000.000,-	100	87,61	2	34.948.605,-	40,00	34,95

	1	22	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pajak & perpanjangan stnk	95	50.000.000,-	19	3.860.600,-	19	10.000.000,-	16	10.000.000,-	84,21	53,78	35	9.238.300,-	36,84	18,48
	1	22	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset	Pengelola keuangan & tenaga kontrak	245	4.982.235.000,-	35	622.746.350,-	49	996.447.000,-	49	992.773.000,-	100	99,63	84	1.615.519.350,-	34,29	32,43
	1	22	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning service dan alat kebersihan	100	303.975.000,-	21	12.784.000,-	20	60.795.000,-	20	60.791.200,-	100	99,99	41	73.575.200,-	41,00	24,20
	1	22	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yg diservice	60	75.000.000,-	12	15.000.000,-	12	15.000.000,-	12	15.000.000,-	100	100,00	24	30.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	105	107.500.000,-	21	21.500.000,-	21	21.500.000,-	21	21.500.000,-	100	100,00	42	43.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan dokumen/ surat	228.250	157.500.000,-	45.650	31.495.600,-	45.650	31.500.000,-	45.650	31.500.000,-	100	100,00	91.300	62.995.600,-	40,00	40,00
	1	22	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	55	350.000.000,-	11	67.743.000,-	11	70.000.000,-	11	60.536.500,-	100	86,48	22	128.279.500,-	40,00	36,65
	1	22	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	30	225.000.000,-	2	28.500.000,-	6	45.000.000,-	6	45.000.000,-	100	100,00	8	73.500.000,-	26,67	32,67
	1	22	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	50	50.000.000,-	10	10.000.000,-	10	10.000.000,-	10	10.000.000,-	100	100,00	20	20.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/ surat kabar/ majalah	20	4.665.490.000,-	4	730.658.900,-	4	933.098.000,-	4	894.975.000,-	100	95,91	8	1.625.633.900,-	40,00	34,84
	1	22	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Snack dan makan minum rapat	20	50.000.000,-	4	10.000.000,-	4	10.000.000,-	4	10.000.000,-	100	100,00	8	20.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	75	1.032.245.000,-	15	112.350.000,-	15	206.449.000,-	15	202.668.711,-	100	98,17	30	315.018.711,-	40,00	30,52
	1	22	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan dinas ke dalam daerah	125	1.288.522.000,-	19	114.645.988,-	25	257.704.400,-	25	257.664.660,-	100	99,98	44	372.310.648,-	35,20	28,89

	1	22	01	01	20	Rujukan berobat PNS	Bantuan berobat pegawai BPMPD	0	0,-	0	0,-										
	1	22	01	01	21	Penyusunan RKA SKPD BPMPD Prov. Kalteng	Dokumen RKA/DPA dan RKPA/DPPA	1.000	85.000.000,-	200	12.000.000,-	200	17.000.000,-	200	16.998.500,-	100	99,99	400	28.998.500,-	40,00	34,12
	1	22	01	01	54	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin	0	0,-	0	0,-										
2	1	22	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.310.000.000,-		1.328.452.800,-		472.000.000,-		459.733.000,-				1.788.185.800,-		
	1	22	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	20	700.000.000,-	0	0,-	1	350.000.000,-	1	337.740.600,-	100	96,50	1	337.740.600,-	5,00	48,25
	1	22	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bahan baku bangunan	50	185.000.000,-	10	15.000.000,-	10	37.000.000,-	10	37.000.000,-	100	100,00	20	52.000.000,-	40,00	28,11
	1	22	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	95	325.000.000,-	19	68.000.000,-	19	65.000.000,-	19	64.992.400,-	100	99,99	38	132.992.400,-	40,00	40,92
	1	22	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	100	100.000.000,-	20	20.000.000,-	20	20.000.000,-	20	20.000.000,-	100	100,00	40	40.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase capaian rehap gedung kantor	0	0,-	10	1.225.452.800,-						10	1.225.452.800,-			
3	1	22	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0,-		39.000.000,-		0,-		0,-				39.000.000,-		
	1	22	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas kantor	0	0,-	60	39.000.000,-						60	39.000.000,-			
4	1	22	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0,-		8.480.000,-		0,-		0,-				8.480.000,-		
	1	22	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Perjalanan dinas	0	0,-	10	8.480.000,-						10	8.480.000,-			

5	1	22	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			240.000.000,-		47.999.200,-		48.000.000,-		47.995.200,-				95.994.400,-		
	1	22	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	200	30.000.000,-	40	6.000.000,-	40	6.000.000,-	40	6.000.000,-	100	100,00	80	12.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen	400	30.000.000,-	80	6.000.000,-	80	6.000.000,-	80	6.000.000,-	100	100,00	160	12.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen	200	15.000.000,-	40	3.000.000,-	40	3.000.000,-	40	3.000.000,-	100	100,00	80	6.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	200	15.000.000,-	40	3.000.000,-	40	3.000.000,-	40	3.000.000,-	100	100,00	80	6.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	06	14	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen	50	12.500.000,-	10	2.500.000,-	10	2.500.000,-	10	2.500.000,-	100	100,00	20	5.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	06	15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen	50	12.500.000,-	10	2.500.000,-	10	2.500.000,-	10	2.500.000,-	100	100,00	20	5.000.000,-	40,00	40,00
	1	22	01	06	33	Penyusunan laporan TEPPRA/ SIMPPD	Honor operator dan jumlah dokumen	65	125.000.000,-	13	24.999.200,-	13	25.000.000,-	13	24.995.200,-	100	99,98	26	49.994.400,-	40,00	40,00
6	1	22	01	08		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah			977.240.000,-		122.136.500,-		195.448.000,-		195.448.000,-				317.584.500,-		
	1	22	01	08	01	Pengelolaan inventaris barang daerah	Honor pengelola barang daerah dan jumlah dokumen	125	977.240.000,-	20	122.136.500,-	25	195.448.000,-	25	195.448.000,-	100	100,00	45	317.584.500,-	36,00	32,50
7	1	22	01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			21.077.688.000,-		2.153.036.420,-		4.215.537.600,-		4.116.746.751,-				6.269.783.171,-		
	1	22	01	15	05	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah laporan	50	9.497.500.000,-	10	1.549.576.610,-	10	1.899.500.000,-	10	1.897.563.500,-	100	99,90	20	3.447.140.110,-	40,00	36,30

	1	22	01	15	07	Lomba pokjantal posyandu	Jumlah kab/kota yang mendapat penilaian lomba	70	500.000.000,-	14	97.942.500,-	14	100.000.000,-	14	97.977.500,-	100	97,98	28	195.920.000,-	40,00	39,18
	1	22	01	15	08	Pelaksanaan PMT-AS	Jumlah Kab/kota yg melaksanakan PMT-AS	30	315.000.000,-	3	62.577.000,-	6	63.000.000,-	6	62.919.000,-	100	99,87	9	125.496.000,-	30,00	39,84
	1	22	01	15	09	Pelaksanaan profil desa/ kelurahan	Jumlah desa/ kel yg melaksanakan profil desa	0	0,-	1.558	99.755.000,-							1.558	99.755.000,-		
	1	22	01	15	10	Pelaksanaan penilaian P2W-KSS	Jumlah kab/kota yg mengikuti penilaian P2W-KSS	40	750.000.000,-	5	132.974.000,-	8	150.000.000,-	7	87.212.200,-	87,50	58,14	12	220.186.200,-	30,00	29,36
	1	22	01	15	11	Sosialisasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Jumlah peserta sosialisasi	0	0,-	40	55.400.000,-							40	55.400.000,-		
	1	22	01	15	13	Sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	0	0,-	50	88.607.800,-							50	88.607.800,-		
	1	22	01	15	19	PAP PNPM -MPd Generasi masyarakat perdesaan	Jumlah dokumen laporan	5	331.025.000,-	1	66.203.510,-	1	66.205.000,-	1	64.463.750,-	100	97,37	2	130.667.260,-	40,00	39,47
	1	22	01	15	20	Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kab/kota yg terfasilitasi dlm peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	70	9.684.163.000,-	0	0,-	14	1.936.832.600,-	14	1.906.610.801,-	100	98,44	14	1.906.610.801,-	20,00	19,69
	1	22	01	15	21	Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)	Jumlah dokumen laporan	0	0,-	0	0,-										

8	1	22	01	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			4.304.935.000,-		591.599.900,-		860.987.000,-		733.974.800,-				1.325.574.700,-		
	1	22	01	16	08	Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro didaerah tertinggal dan pusat kemiskinan daerah	Jumlah peserta pelatihan	150	350.000.000,-	30	67.412.800,-	30	70.000.000,-	30	67.302.800,-	100	96,15	60	134.715.600,-	40,00	38,49
	1	22	01	16	09	Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi UEM	Laporan penilaian lomba pasar desa	5	627.500.000,-	1	85.000.000,-	1	125.500.000,-	1	12.550.000,-	100	10,00	2	97.550.000,-	40,00	15,55
	1	22	01	16	10	Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan	5	513.575.000,-	1	74.815.300,-	1	102.715.000,-	1	102.715.000,-	100	100,00	2	177.530.300,-	40,00	34,57
	1	22	01	16	11	Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	Jumlah peserta	150	350.000.000,-	30	68.598.600,-	30	70.000.000,-	30	70.000.000,-	100	100,00	60	138.598.600,-	40,00	39,60
	1	22	01	16	15	Bantuan paket modal BUMDes lengkap dengan buku administrasi	Jumlah kab/kota yg mendapat bantuan paket modal	10	722.500.000,-	2	49.773.200,-	2	144.500.000,-	2	133.135.000,-	100	92,13	4	182.908.200,-	40,00	25,32
	1	22	01	16	17	Pelaksanaan pameran	Jumlah dokumen laporan	10	1.741.360.000,-	2	246.000.000,-	2	348.272.000,-	2	348.272.000,-	100	100,00	4	594.272.000,-	40,00	34,13
	1	22	01	16	22	Pembangunan pasar desa	Jumlah kab yg terfasilitasi dalam pembangunan pasar desa	0	0,-	0	0,-							0	0,-		
9	1	22	01	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			6.124.400.000,-		1.336.045.401,-		1.224.880.000,-		1.206.235.204,-				2.542.280.605,-		
	1	22	01	17	05	Pelaksanaan PM2L	Jumlah dokumen laporan	5	446.000.000,-	5	500.083.120,-	1	89.200.000,-	1	75.751.476,-	100	84,92	6	575.834.596,-	120,00	129,11
	1	22	01	17	06	Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan	Jumlah dokumen laporan	5	1.000.000.000,-	1	179.878.700,-	1	200.000.000,-	1	199.800.000,-	100	99,90	2	379.678.700,-	40,00	37,97

	1	22	01	17	08	Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah dokumen laporan	10	1.250.000.000,-	1	196.060.000,-	2	250.000.000,-	2	246.682.750,-	100	98,67	3	442.742.750,-	30,00	35,42
	1	22	01	17	10	Rapat kerja teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Jumlah aparatur yg menjadi peserta rakernis	0	0,-	56	129.450.000,-							56	129.450.000,-		
	1	22	01	17	11	Sosialisasi Penanganan HIV-AIDS	Jumlah peserta sosialisasi	200	750.000.000,-	0	0,-	40	150.000.000,-	40	149.440.000,-	100	99,63	40	149.440.000,-	20,00	19,93
	1	22	01	17	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	175	2.678.400.000,-	30	330.573.581,-	35	535.680.000,-	35	534.560.978,-	100	99,79	65	865.134.559,-	37,14	32,30
10	1	22	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			4.275.435.000,-		822.162.220,-		855.087.000,-		840.888.679,-				1.663.050.899,-		
	1	22	01	18	05	Pelatihan bimtek, rakor pengelolaan ADD, keuangan dan aset kekayaan desa sebagai sumber PADes	Jumlah aparatur desa yg mampu mengelola keuangan dan aset desa	150	388.250.000,-	26	75.849.420,-	30	77.650.000,-	30	71.491.380,-	100	92,07	56	147.340.800,-	37,33	37,95
	1	22	01	18	06	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota	Perjalanan dinas dalam daerah	100	837.500.000,-	18	67.855.250,-	20	167.500.000,-	20	167.079.810,-	100	99,75	38	234.935.060,-	38,00	28,05
	1	22	01	18	07	Pelaksanaan bantuan keuangan pemdes dan kel	Jumlah tim verifikasi dan monitoring	35	299.500.000,-	7	60.000.000,-	7	59.900.000,-	7	59.870.000,-	100	99,95	14	119.870.000,-	40,00	40,02
	1	22	01	18	08	Pelaksanaan pembinaan pemdes dan kel pada desa model	Jumlah desa model yg dibina	35	300.000.000,-	1	39.840.000,-	7	60.000.000,-	7	59.588.910,-	100	99,31	8	99.428.910,-	22,86	33,14
	1	22	01	18	09	Pelatihan pemantapan tupoksi BPD	Jumlah peserta pelatihan	0	0,-	30	79.750.000,-							30	79.750.000,-		
	1	22	01	18	11	Pelatihan manajemen keuangan dan aset desa	Jumlah aparatur desa yg mengikuti pelatihan	0	0,-	30	72.720.000,-							30	72.720.000,-		

	1	22	01	18	15	Sosialisasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa	Jumlah aparaturnya yg mengikuti sosialisasi	600	492.125.500,-	120	82.613.500,-	120									
	1	22	01	18	16	Kaji banding pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Jumlah yg mengikuti kaji banding ke luar daerah	0	0,-	20	343.534.050,-						20	343.534.050,-			
	1	22	01	18	17	Bimtek pemantapan pemerintahan kelurahan	Jumlah peserta bimtek	0	0,-	0	0,-						0	0,-			
	1	22	01	18	18	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Jumlah desa/kel yg mendapat pembinaan	600	1.958.059.500,-	0	0,-	120	391.611.900,-	120	384.883.579,-	100	98,28	120	384.883.579,-	20,00	19,66
	1	22	01	18	19	Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	Jumlah peserta bimtek	0	0,-	0	0,-						0	0,-			
	1	22	01	18	20	Inventarisasi aset desa	Jumlah dokumen laporan	0	0,-	0	0,-						0	0,-			
11	1	22	01	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			0,-		0,-		0,-		0,-			0,-			
	1	22	01	19	05	Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	Jumlah aparaturnya di lembaga pemerintahan desa yg mengikuti pelatihan	0	0,-	40	0,-						40	0,-			
12	1	22	01	20		Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)			3.362.500.000,-		587.706.090,-		672.500.000,-		669.606.544,-			1.257.312.634,-			
	1	22	01	20	01	Kemitraan TMMD dengan masyarakat	Jumlah kab/kota yg mendapatkan bantuan stimulan tmmd	5	300.000.000,-	1	59.699.400,-	1	60.000.000,-	1	59.653.860,-	100	99,42	2	119.353.260,-	40,00	39,78

	1	22	01	20	02	Pelaksanaan gelar TTG	Jumlah kab/kota yg mengikuti Gelar TTG Tk. Nasional	70	1.500.000.000,-	14	310.000.000,-	14	300.000.000,-	14	298.858.374,-	100	99,62	28	608.858.374,-	40,00	40,59
	1	22	01	20	06	Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek	Jumlah dokumen laporan	25	445.000.000,-	4	75.000.000,-	5	89.000.000,-	5	88.168.150,-	100	99,07	9	163.168.150,-	36,00	36,67
	1	22	01	20	08	Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	Jumlah monev pelaksanaan CSR dan CD	125	467.500.000,-	20	69.779.750,-	25	93.500.000,-	25	93.238.030,-	100	99,72	45	163.017.780,-	36,00	34,87
	1	22	01	20	09	Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	Jumlah peserta rakor	70	650.000.000,-	14	73.226.940,-	14	130.000.000,-	14	129.688.130,-	100	99,76	28	202.915.070,-	40,00	31,22
	1	22	01	20	21	Pengembangan hasil inovasi TTG	Jumlah kab/kota yg mendapatkan bantuan alat inovasi TTG	0	0,-	0	0,-							0	0,-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutinitas dimana program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun, baik program dan kegiatan yang bersifat nasional maupun yang bersifat daerah (lokal), walaupun terdapat juga beberapa program dan kegiatan yang baru namun sifatnya lambat perkembangannya dengan menyesuaikan keadaan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah maupun kepentingan yang lain.

Program dan kegiatan yang bersifat rutinitas ini disebabkan antara lain : 1) sesuai dengan kebijakan dari eselon I atau Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; 2) alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah relatif kecil, sehingga untuk membuat program-program baru yang menyentuh langsung ke masyarakat tidak dapat terpenuhi; 3) Program dan kegiatan hanya bersifat pembinaan bukan pelaksana teknis secara langsung.

Sedangkan pengkajian pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 realisasi per kegiatan rata-rata hampir mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	6	7	8		10	11	12	13	15
1.	Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.	a. Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa	379	700	1.000	1.400	379	700	1.000	1.400	
			b. Persentase stakeholder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa	60%	70%	80%	90%	60%	70%	80%	90%	
2.	Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa.	2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa.	a. Jumlah lembaga desa yang berprtsipasi dalam pembangunan dan perkembangan desa	26	30	34	38	26	30	34	38	
3.	Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa	3. Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial	a. Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	4%	5%	6%	7%	4%	5%	6%	7%	

	yang maju dan dinamis.	dasar masyarakat desa.										
4.	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan.	4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa.	a. Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi	20%	30%	40%	50%	20%	30%	40%	50%	
			b. Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal	20%	30%	40%	50%	20%	30%	40%	50%	
			c. Persentase peningkatan pengembangan unit pangan pada BUMDes	20%	30%	40%	50%	20%	30%	40%	50%	
5.	Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan.	5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.	a. Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat	3 alat	4 alat	5 alat	6 alat	3 alat	4 alat	5 alat	6 alat	
			b. Persentase perkembangan jumlah Posyantek/Posyantekdes/Wartekdesy yang aktif tiap tahun	50%	55%	60%	65%	50%	55%	60%	65%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka telah dilaksanakan program-program dan kegiatan yang berkaitan dalam memberdayakan masyarakat pedesaan terutama yang berkaitan dengan menanggulangi kemiskinan daerah. Untuk mencapai tujuan dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, agar terjadi sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa program daerah seperti Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan Program-program/Kegiatan yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten sebagai program andalan daerah dalam menanggulangi kemiskinan, maupun Program-Program dan kegiatan yang telah ditentukan dan berasal dari pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpotensi dalam menangani penanggulangan kemiskinan seperti Program-Program dan Kegiatan yang tidak secara langsung menyentuh masyarakat seperti Lomba Desa/Kelurahan, Pengembangan Pokjanal Posyandu, Pelaksanaan Profil Desa/Kelurahan, Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan lain-lain. Sedang Program dan Kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat langsung yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Serta dalam rangka kepedulian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan kegiatan Raker Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai salah satu kegiatan strategis.

Namun dalam menjalankan program dan kegiatannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah kurang maksimal karena kurang didukung oleh alokasi dana yang memadai dalam melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi lima tahunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan penyesuaian dengan pagu anggaran definitif yang diperoleh dari Pemerintah Daerah serta perubahan kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan daerah. Perkembangan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun		3.190.756.400	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun		3.190.756.400
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya penyediaan materai, penggandaan surat menyurat	1.400 surat	12.715.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya penyediaan materai, penggandaan surat menyurat	1 Paket	12.715.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	Pembayaran biaya rekening telepon, listrik dan air	5 rekening pembayaran	221.800.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	Pembayaran biaya rekening telepon, listrik dan air	12 Bulan	221.800.000
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya asuransi kebakaran gedung kantor DPMDes Prov. Kalteng	1 polis asuransi	30.000.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya asuransi kebakaran gedung kantor DPMDes Prov. Kalteng	1 Tahun	30.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas	25 unit	12.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas	1 Tahun	12.500.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset	Kota Palangka Raya	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	384.472.400	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset	Kota Palangka Raya	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	384.472.400
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya honorarium petugas kebersihan, pengadaan alat pembersih dan alat kebersihan	20 jenis	86.955.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya honorarium petugas kebersihan, jaga malam dan pemeliharaan taman serta pengadaan alat pembersih dan alat kebersihan	12 Bulan	86.955.000

	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan/ service komputer, mesin tik, peralatan kerja lainnya	12 Unit	15.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan/ service komputer, mesin tik, peralatan kerja lainnya	12 Unit	15.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya alat tulis kantor	21 jenis	21.500.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	21.500.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen/ surat	1 paket	60.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen/ surat	12 Bulan	60.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pembelian bola lampu dan peralatan listrik lainnya dan pemasangan baru instalasi/ pemasangan listrik untuk gedung/aula DPMDes Prov. Kalteng	15 Jenis	86.900.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pembelian bola lampu dan peralatan listrik lainnya dan pemasangan baru instalasi/ pemasangan listrik untuk gedung/aula DPMDes Prov. Kalteng	11 Jenis	86.900.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Paket	458.950.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	458.950.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Palangka Raya	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	10 Jenis	150.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Palangka Raya	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	10 Jenis	150.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Tersedianya pembayaran langganan surat kabar/majalah, buletin media informasi pemberdayaan masyarakat dan desa	3 media	31.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Tersedianya pembayaran langganan surat kabar/majalah, buletin media informasi pemberdayaan masyarakat dan desa	3 media	31.500.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	Tersedianya snack dan minuman tamu/ rapat	12 kali	60.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	Tersedianya snack dan minuman tamu/ rapat	12 kali	60.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah	28 kali	365.428..000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah	28 kali	365.428..000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya perjalanan dinas ke dalam daerah	64 kali	400.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya perjalanan dinas ke dalam daerah	64 kali	400.000.000

	Pembinaan Non PNS	Kota Palangka Raya	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	33 orang	693.036.000	Pembinaan Non PNS	Kota Palangka Raya	Tersedianya jasa instruktur senam	33 orang	693.036.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Kota Palangka Raya	Tersedianya pengelolaan website kantor	1 website	100.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Kota Palangka Raya	Tersedianya pengelolaan website kantor	1 website	100.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terselenggaranya Peningkatan dan Prasarana Aparatur		413.968.700	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terselenggaranya Peningkatan dan Prasarana Aparatur		413.968.700
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya service AC, sound sistem dan peralatan gedung kantor lainnya	15 jenis	143.968.700	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya service AC, sound sistem dan peralatan gedung kantor lainnya	15 jenis	143.968.700
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pengganti suku cadang kendaraan roda 4, pembelian pelumas dan bensin kendaraan roda 4	25 unit	150.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pengganti suku cadang kendaraan roda 4, pembelian pelumas dan bensin kendaraan roda 4	25 unit	150.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	23 unit	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	23 unit	20.000.000
	Penyebaran data dan informasi	Prov. Kalteng	Tersedianya kegiatan yang diikuti untuk penyebaran informasi	4 kegiatan	100.000.000	Penyebaran data dan informasi	Prov. Kalteng	Tersedianya kegiatan yang diikuti untuk penyebaran informasi	4 kegiatan	100.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun		245.390.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun		245.390.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas harian	85 stel	117.370.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas harian	85 stel	117.370.000
	Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu	Kota Palangka Raya	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	21 set	128.020.000	Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu	Kota Palangka Raya	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	21 set	128.020.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun		137.710.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun		55.000.000

	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Tersedianya bimtek bagi pegawai DPMDes Prov. Kalteng	69 orang	137.710.000	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Tersedianya bimtek bagi pegawai DPMDes Prov. Kalteng	69 orang	137.710.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun		671.980.200	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun		671.980.200
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan	40 dokumen	5.350.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan	40 dokumen	5.350.000
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan	80 buku	13.904.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan	80 buku	13.904.000
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	40 dokumen	13.284.600	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	40 dokumen	13.284.600
	Penyusunan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	406 buku	56.000.000	Penyusunan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	406 buku	56.000.000
	Penyusunan LAKIP	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	10 dokumen	10.800.000	Penyusunan LAKIP	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	10 dokumen	10.800.000
	Penyusunan Renja SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	10 dokumen	25.000.000	Penyusunan Renja SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	10 dokumen	25.000.000
	Penyusunan laporan TEPPRA/SIMP3D	Kota Palangka Raya	Pembayaran honorarium operator	3 orang	43.000.000	Penyusunan laporan TEPPRA/SIMP3D	Kota Palangka Raya	Pembayaran honorarium operator	3 orang	43.000.000
	Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa	13 kab dan prov lainntya	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa	70 keg	437.641.600	Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa	13 kab dan prov lainntya	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa	70 keg	437.641.600
	Rapat kerja teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya rakernis	80 OK	67.000.000	Rpat kerja teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya rakernis	80 OK	67.000.000

	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah		Terselenggarannya Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran		106.117.000	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah		Terselenggarannya Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran		106.117.000
	Pengelolaan inventaris barang daerah	Kota Palangka Raya	Tersedia dan tertibnya pengelolaan administrasi dokumen barang daerah	20 dokumen	106.117.000	Pengelolaan inventaris barang daerah	Kota Palangka Raya	Tersedia dan tertibnya pengelolaan administrasi dokumen barang daerah	20 dokumen	106.117.000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		3.131.911.700	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		3.131.911.700
	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	14 Kab/Kota	Tersedianya PKK aktif	1718 PKK	1.849.500.000	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	14 Kab/Kota	Tersedianya PKK aktif	1718 PKK	1.849.500.000
	Lomba pokjantal posyandu	Kota Palangka Raya	Tersedianya posyandu aktif	2.240 posyandu	194.000.000	Lomba pokjantal posyandu	Kota Palangka Raya	Tersedianya posyandu aktif	2.240 posyandu	194.000.000
	Pelaksanaan PMT - AS	Prov. Kalteng	Jumlah kabupaten yang mengikuti PMT-AS	6 kabupaten	80.000.000	Pelaksanaan PMT - AS	Prov. Kalteng	Jumlah kabupaten yang mengiuti PMT-AS	6 kabupaten	80.000.000
	Pelaksanaan profil desa/ kelurahan	Kota Palangka Raya dan 13 Kab.	Jumlah desa/kelurahan	1.433desa/kel	76.500.000	Pelaksanaan profil desa/ kelurahan	Kota Palangka Raya dan 13 Kab.	Jumlah desa/kelurahan	1.433desa/kel	76.500.000
	Sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	30 orang	30.000.000	Sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	30 orang	30.000.000
	Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan	14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain	Terlaksanana monev lembaga kemasyarakat di desa	10 OK	701.911.700	Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan	14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain	Terlaksanana monev lembaga kemasyarakat di desa	10 OK	701.911.700

	Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)	14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain	Terlaksananya Gelar Expo Nusantara	1 paket	200.000.000	Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)	14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain	Terlaksananya Gelar Expo Nusantara	1 paket	200.000.000
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro, serta Akses Modal Usaha bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat		1.327.500.000	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro, serta Akses Modal Usaha bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat		1.142.000.000
	Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan	14 Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	1 laporan keg	85.000.000	Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan	14 Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	1 laporan keg	85.000.000
	Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	14 Kab/Kota	Terlaksannya kegiatan Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	40 org	90.000.000	Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	14 Kab/Kota	Terlaksannya kegiatan Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	40 org	90.000.000
	Pelaksanaan pameran	Palangka Raya,Prov. Lain	Terlaksananya pameran	3 dokumen	250.000.000	Pelaksanaan Pameran	Palangka Raya,Prov. Lain	Terlaksananya pameran	3 dokumen	250.000.000
	Pelatihan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga	Palangka Raya	Terlaksannya kegiatan pelatihan	45 org	126.000.000	Pelatihan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga	Palangka Raya	Terlaksannya kegiatan pelatihan	45 org	126.000.000
	Pelatihan desa online	Palangka Raya	Terlaksannya kegiatan pelatihan desa online	40 org	102.000.000	Pelatihan desa online	Palangka Raya	Terlaksannya kegiatan pelatihan desa online	40 org	102.000.000
	Bimbingan teknis pengelolaan pasar desa se-Kalteng	Palangka Raya	Terlaksananya bimtek pengelolaan pasar desa	40 org	118.000.000	Bimbingan teknis pengelolaan pasar desa	Palangka Raya	Terlaksananya bimtek pengelolaan pasar desa	40 org	118.000.000
	Bimbingan teknis BUMDes se-Kalteng	Palangka Raya	Terlaksananya bimtek BUMDes	50 org	125.000.000	Bimbingan teknis BUMDes	Palangka Raya	Terlaksananya bimtek BUMDes	50 org	125.000.000
	Lomba pasar desa tingkat Provinsi Kalteng	14 Kab/Kota	Terlaksananya lomba pasar desa	13 pasar desa	106.500.000	Lomba pasar desa	14 Kab/Kota	Terlaksananya lomba pasar desa	13 pasar desa	106.500.000
	Koordinasi konsultasi penguatan pasar desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya koordinasi konsultasi tentang penguatan pasar desa	1 tahun	75.000.000	Koordinasi konsultasi penguatan pasar desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya koordinasi konsultasi tentang penguatan pasar desa	1 tahun	75.000.000
	Rakernis Badan Usaha Milik Desa se-Kalteng	Palangka Raya	Terlaksananya Rakernis Badan Usaha Milik Desa se-Kalteng	400 orang	250.000.000	Rakernis Badan Usaha Milik Desa se-Kalteng	Palangka Raya	Terlaksananya Rakernis Badan Usaha Milik Desa se-Kalteng	400 orang	250.000.000

	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Terciptanya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		1.899.600.000	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Terciptanya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		1.899.600.000
	Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan Tingkat Prov. Kalteng	14 Kab/Kota	Jumlah desa/kelurahan yg mengikuti penilaian lomba desa kelurahan tingkat Provinsi	27 desa/ kelurahan	1.035.000.000	Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan Tingkat Prov. Kalteng	14 Kab/Kota	Jumlah desa/kelurahan yg mengikuti penilaian lomba desa kelurahan tingkat Provinsi	27 desa/ kelurahan	1.035.000.000
	Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya kegiatan pencanangan BBGRM	3 dokumen laporan	512.600.000	Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya kegiatan pencanangan BBGRM	3 dokumen laporan	512.600.000
	Validasi data dan kodefikasi nama desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya desa yang terdata	1433 desa/kel	44.400.000	Validasi data dan kodefikasi nama desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya desa yang terdata	1433 desa/kel	44.400.000
	Pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan dan musyawarah desa	Palangka Raya	Jumlah peserta pelatihan	120 org	113.500.000	Pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan dan musyawarah desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta pelatihan	120 org	113.500.000
	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat provinsi Kalteng	Palangka Raya	Terlaksananya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	12 laporan	194.100.000	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Palangka Raya	Terlaksananya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	12 laporan	194.100.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintahan Desa		4.106.566.000	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintahan Desa		4.106.566.000
	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya pembinaan dan monev pelaksanaan ADD	20 kali	160.000.000	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya pembinaan dan monev pelaksanaan ADD	20 kali	160.000.000
	Monitoring penyaluran bantuan keuangan dan dana desa se-Kalteng	Kota Palangka Raya	Terlaksananya monitoring penyaluran keuangan dan dana desa	1.428 desa/kel	379.543.000	Monitoring penyaluran bantuan keuangan dan dana desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya monitoring penyaluran keuangan dan dana desa	1.428 desa/kel	379.543.000
	Pelatihan pemantapan tupoksi BPD se-Kalteng	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta yg mengikuti pelatihan	80 Org	126.000.000	Pelatihan pemantapan tupoksi BPD	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta yg mengikuti pelatihan	80 Org	126.000.000

	Pelatihan manajemen keuangan dan aset desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya pelatihan manajemen keuangan dan aset dea	13 kab	225.000.000	Pelatihan manajemen keuangan dan aset desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya pelatihan manajemen keuangan dan aset dea	13 kab	225.000.000
	Sosialisasi pertauran mengenai desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta sosialisasi	100 org	200.000.000	Sosialisasi pertauran mengenai desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta sosialisasi	100 org	200.000.000
	Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	Kota Palangka Raya	Aparatur desa yang mengikuti bimtek	13 kab	225.000.000	Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	Kota Palangka Raya	Aparatur desa yang mengikuti bimtek	13 kab	225.000.000
	Rakor Pembina teknis pemerintahan desa (PTPD)	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta yang mengikuti rakor	136 org	250.000.000	Raker Pembina teknis pemerintahan desa (PTPD)	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta yang mengikuti rakor	136 org	250.000.000
	Raker penyelenggaraan pemerintahan desa se-Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya raker penyelenggaraan pemerintahan desa	1433 org	1.791.023.000	Raker penyelenggaraan pemerintahan desa se-Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya raker penyelenggaraan pemerintahan desa	1433 org	1.791.023.000
	Evaluasi rancangan peraturan kepala daerah terkait desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan bupati	13 kab/kota	100.000.000	Evaluasi rancangan peraturan kepala daerah terkait desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan bupati	13 kab/kota	100.000.000
	Penataan administrasi pemerintahan desa se-Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan desa	13 kab/kota	100.000.000	Penataan administrasi pemerintahan desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan desa se-Kalteng	13 kab/kota	100.000.000
	Pemantauan pilkades serentak	Provinsi Kalimantan Tengah	Telaksanannya pemantauan pilkades serentak	24 desa	100.000.000	Pemantauan pilkades serentak	Provinsi Kalimantan Tengah	Telaksanannya pemantauan pilkades serentak	24 desa	100.000.000
	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa	30 kali	100.000.000	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa	30 kali	100.000.000

	Pembelajaran pengelolaan keuangan dan dana desa	Provinsi lain	Telaksanannya pembelajaran pengelolaan keuangan dan dana desa	130 kades	350.000.000	Pembelajaran pengelolaan keuangan dan dana desa	Provinsi lain	Telaksanannya pembelajaran pengelolaan keuangan dan dana desa	130 kades	350.000.000
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		Terciptanya Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		336.000.000	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		Terciptanya Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		336.000.000
	Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	35 org	336.000.000	Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	35 org	336.000.000
	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		1.568.500.000	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		1.568.500.000
	Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat	Prov. Kalteng	Terlaksananya Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat	2 laporan	150.000.000	Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat	2 kab	Terlaksananya Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat	2 laporan	150.000.000
	Pelaksanaan gelar TTG	1 kab dan Provinsi Lain	Terlaksananya Gelar TTG bagi masyarakat pedesaan	6 alat TTG	500.000.000	Pelaksanaan gelar TTG	1 kab dan Provinsi Lain	Terlaksananya Gelar TTG bagi masyarakat pedesaan	6 alat TTG	500.000.000
	Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek	1 dokumen	110.000.000	Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek	1 dokumen	110.000.000
	Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	1 laporan	84.000.000	Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	4 laporan	84.000.000
	Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	28 orang	100.000.000	Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	7 kab	Terlaksananya peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	28 orang	100.000.000

	Peningkatan peran serta generasi muda desa dan hak politik dalam ketahanan masyarakat	Kota Palangka Raya	Terlaksanannya pelatihan Peningkatan peran serta generasi muda desa dan hak politik dalam ketahanan masyarakat	105 org	560.000.000	Peningkatan peran serta generasi muda desa dan hak politik dalam ketahanan masyarakat	Kota Palangka Raya	Terlaksanannya pelatihan Peningkatan peran serta generasi muda desa dan hak politik dalam ketahanan masyarakat	105 org	560.000.000
	Penguatan Kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan	7 kab	Terlaksanannya rapat penguatan kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan	26 org	100.000.000	Penguatan Kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan	7 kab	Terlaksanannya rapat penguatan kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan	26 org	100.000.000
	JUMLAH				17.136.000.000					17.136.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa dan tekadnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah yang ditargetkan pada Tahun 2011 sebesar 4,5 %, Tahun 2012 sebesar 3,5 %, Tahun 2013 sebesar 3 %, Tahun 2014 sebesar 2,5 %, Tahun 2015 sebesar 2 %, serta keteresolasian dan rendahnya pembangunan infrastruktur perdesaan adalah merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya usulan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan juga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan misinya yaitu:

- 1) pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi;
- 2) pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah;
- 3) terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah,

Hal tersebut diatas merupakan tolok ukur juga dalam pengusulan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya penyediaan materai, penggandaan surat menyurat	1 Paket	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	Pembayaran biaya rekening telepon, listrik dan air	12 Bulan	
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya asuransi kebakaran gedung kantor DPMDes Prov. Kalteng	1 Tahun	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas	1 Tahun	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset	Kota Palangka Raya	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya honorarium petugas kebersihan, jaga malam dan pemeliharaan taman serta pengadaan alat pembersih dan alat kebersihan	12 Bulan	

7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan/ service komputer, mesin tik, peralatan kerja lainnya	12 Unit	
8	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen/ surat	12 Bulan	
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pembelian bola lampu dan peralatan listrik lainnya dan pemasangan baru instalasi/ pemasangan listrik untuk gedung/aula DPMDes Prov. Kalteng	11 Jenis	
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Palangka Raya	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	10 Jenis	
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Tersedianya pembayaran langganan surat kabar/majalah, buletin media informasi pemberdayaan masyarakat dan desa	12 Bulan	
14	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	Tersedianya snack dan minuman tamu/ rapat	12 Bulan	
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan	
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya perjalanan dinas ke dalam daerah	1 Tahun	
17	Pembinaan Non PNS	Kota Palangka Raya	Tersedianya jasa instruktur senam	12 Bulan	
18	Pengembangan Dan Pengelolaan Website Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya pengelolaan website kantor	1 Tahun	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terselenggaranya Peningkatan dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya service AC, sound sistem dan peralatan gedung kantor lainnya	12 Bulan	

2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pengganti suku cadang kendaraan roda 4, pembelian pelumas dan bensin kendaraan roda 4	1 Paket	
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 paket	
4	Penyebaran Data dan Informasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya kegiatan yang diikuti untuk penyebaran informasi	4 kegiatan	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun		
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas harian	85 stel	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Palangka Raya	Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian adat	21 set	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun		
1	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Tersedianya bimtek bagi pegawai DPMDes Prov. Kalteng	2 orang	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan	1 Paket	
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan	1 Paket	
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	1 Paket	
4	Penyusunan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	1 Paket	
5	Penyusunan LAKIP	Kota Palangka	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	1 Paket	

		Raya			
6	Penyusunan Renja SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan	1 Paket	
7	Penyusunan laporan TEPPRA/SIMP3D	Kota Palangka Raya	Pembayaran honorarium operator	1 tahun	
8	Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa	13 kab dan prov lainnya	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa	216 OH	
9	Rapat kerja teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya rakernis	78 OK	
VI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah		Terselenggarannya Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Pengelolaan inventaris barang daerah	Kota Palangka Raya	Tersedia dan tertibnya pengelolaan administrasi dokumen barang daerah	1 Tahun	
VII	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		
1	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	14 Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	1718 PKK	
2	Lomba pokjanal posyandu	Kota Palangka Raya	Pelaksanaan Rapat koordinasi, pameran, gelar karya pemberdayaan	14 pokjanal	
3	Pelaksanaan PMT-AS	6 Kabupaten	Jumlah kabupaten yang mengikuti PMT-AS	6 kabupaten	
4	Pelaksanaan profil desa/ kelurahan	Kota Palangka Raya dan 13 Kab.	Jumlah peserta Kab/Kota yang mengikuti lomba Pokjanal Posyandu	150 orang	
5	Sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	60 orang	

6	Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan	14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain	Terlaksanana monev lembaga kemasyarakat di desa	10 OK	
7	Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)	14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain	Terlaksananya Gelar Expo Nusantara	1 paket	
VIII	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro, serta Akses Modal Usaha bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
1	Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan	14 Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	1 laporan keg	
2	Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	14 Kab/Kota	Terlaksannya kegiatan Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	50 org	
3	Pelaksanaan pameran	Palangka Raya,Prov. Lain	Terlaksananya pameran	1 Paket	
4	Pelatihan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga	Palangka Raya	Terlaksannya kegiatan pelatihan	90 org	
5	Pelatihan desa online	Palangka Raya	Terlaksannya kegiatan pelatihan desa online	80 org	
6	Bimbingan teknis pengelolaan pasar desa se Kaltng	Palangka Raya	Terlaksananya bimtek pengelolaan pasar desa	60 org	
7	Bimbingan teknis BUMDes se-Kalteng	Palangka Raya	Terlaksananya bimtek BUMDes	100 org	
8	Lomba pasar desa tingkat Provinsi Kalteng	14 Kab/Kota	Terlaksananya lomba pasar desa	desa	
9	Koordinasi konsultasi penguatan pasar desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya koordinasi konsultasi tentang penguatan pasar desa	1 tahun	
10	Rakernis Badan Usaha Milik Desa se-Kalteng				
IX	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Terciptanya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		

1	Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan tingka provinsi Kalteng	14 Kab/Kota	Jumlah desa/kelurahan yg mengikuti penilaian lomba desa kelurahan tingkat Provinsi	27 desa/ kelurahan	
2	Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa/kelurahan yg mengikuti pencanangan BBGRM	27 desa/ kelurahan	
3	Validasi data dan kodefikasi nama desa	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	30 org	
4	Pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan dan musyawarah desa	Palangka Raya	Jumlah peserta pelatihan	40 org	
5	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Palangka Raya	Terlaksananya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	717 desa	
X	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintahan Desa		
1	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya pembinaan dan monev pelaksanaan ADD	13 kab/kota	
2	Monitoring penyaluran bantuan keuangan dan dana desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya monitoring penyaluran keuangan dan dana desa	13 kab/kota	
3	Pelatihan pemantapan tupoksi BPD se-Kalteng	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta yg mengikuti pelatihan	60 Org	
4	Sosialisasi peraturan mengenai desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya sosialisasi	100 org	
5	Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Bimtek	100 org	
6	Rakor Pembina teknis pemerintahan desa (PTPD)	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta yang mengikuti rakor	136 org	
7	Raker penyelenggaraan pemerintahan desa se Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya raker penyelenggaraan pemerintahan desa	1433 org	
8	Evaluasi rancangan peraturan kepala daerah terkait desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan bupati	13 kab/kota	
9	Penataan administrasi pemerintahan desa se Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan desa	13 kab/kota	

10	Pemantauan pilkades serentak	Provinsi Kalimantan Tengah	Telaksanannya pemantauan pilkades serentak	13 kab/kota	
11	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa se Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa	13 kab/kota	
12	Pembelajaran pengelolaan keuangan dan dana desa	Provinsi lain	Telaksananya pembelajaran pengelolaan keuangan dan dana desa	130 kades	
XI	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		
1	Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	80 org	
XII	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		
1	Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat	2 kab	Terlaksananya Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat	2 laporan	
2	Pelaksanaan gelar TTG	1 kab dan Provinsi Lain	Terlaksananya Gelar TTG bagi masyarakat perdesaan	6 alat TTG	
3	Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek	52 org	
4	Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	1 laporan	
5	Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	7 kab	Terlaksananya peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	1 laporan	
6	Peningkatan peran serta generasi muda desa dan hak politik dalam ketahanan masyarakat	Kota Palangka Raya	Terlaksananya pelatihan Peningkatan peran serta generasi muda desa dan hak politik dalam ketahanan masyarakat	105 org	

7	Penguatan Kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan	7 kab	Terlaksananya rapat penguatan kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan	100 org	
---	---	-------	---	---------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari arah kebijakan dan strategi nasional dan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan strategi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada agenda prioritas pemerintah terkait dengan desa melihat pada Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada point ke 3 (tiga) berbunyi “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Kementerian Dalam Negeri dalam aspek pembangunan daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan desa telah melaksanakan berbagai agenda yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa;
3. PNPM Mandiri Perdesaan;
4. Peningkatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
5. Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Beberapa capaian dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan antara lain:

1. tersusunnya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan desa, meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana terakhir kali telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;
2. di tahun 2014 ditetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (b) Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (c) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, dan (d) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

3. di tahun 2015 ditetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, (b) Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (c) Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan (d) Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
4. di tahun 2016 ditetapkan 5 (lima) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (b) Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (c) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (d) Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dan (e) Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Kementerian Dalam Negeri memiliki tujuan pengaturan desa yang antara lain adalah:

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
7. meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Fokus Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015-2019 adalah:

- a. Pengawasan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Percepatan pembangunan 122 Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal;
- c. Percepatan pembangunan desa tertinggal sebanyak 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal;
- d. Pengembangan daerah tertentu, yang terdiri dari daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, daerah pulau kecil dan terluar;
- e. Pembangunan dan Pengembangan Satuan Permukiman (SP) sebagai Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.
- f. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat pertumbuhan.

Kalau dilihat dari penjabaran kebijakan nasional yang telah dituang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bahwa arah program dan kegiatannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat di pedesaan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan integrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 pada khususnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 pada umumnya.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- c. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan masyarakat adat dan sosial budaya masyarakat;
- d. Meningkatnya usaha ekonomi produksi masyarakat desa;
- e. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah dituangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapainya.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan adalah 12 program dengan total kegiatan 73 kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

- Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 8) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 14) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 15) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 16) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - 17) Pembinaan Non PNS
 - 18) Pengembangan dan Pengelolaan Website Kantor
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 4) Penyebaran Data dan Informasi
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - 3) Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
 - 4) Penyusunan RKA-SKPD
 - 5) Penyusunan LAKIP
 - 6) Penyusunan Renja SKPD
 - 7) Penyusunan Laporan TEPPA/SIMPPD
 - 8) Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 9) Rapat Kerja Teknis dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
 - 1) Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - 1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - 2) Lomba Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi Kalteng
 - 3) Pelaksanaan PMT-AS
 - 4) Pelaksanaan Profil Desa/ Kelurahan Tingkat Provinsi Kalteng
 - 5) Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat
 - 6) Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan
 - 7) Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - 2) Pemanfaatan SDA Pedesaan Bagi Pembangunan Ketahanan Masyarakat (CPPD)
 - 3) Pelaksanaan Pameran
 - 4) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga
 - 5) Pelatihan Desa Online
 - 6) Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se -Kalteng
 - 7) Bimbingan Teknis BUMDES se-Kalteng
 - 8) Lomba Pasar Desa Tingkat Provinsi Kalteng
 - 9) Koordinasi Konsultasi Penguatan Pasar Desa
 - 10) Rakernis Badan Usaha Milik Desa se-Kalteng

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - 1) Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Kalteng
 - 2) Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
 - 3) Validasi Data dan Kodefikasi Nama Desa
 - 4) Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Desa
 - 5) Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalteng

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 1) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD
 - 2) Monitoring Penyaluran Bantuan Keuangan dan Dana Desa se-Kalteng
 - 3) Pelatihan Pemantapan Tupoksi BPD se-Kalteng
 - 4) Pelatihan Manajemen Keuangan dan Aset Desa
 - 5) Sosialisasi Peraturan Mengenai Desa
 - 6) Bimtek Pengadaan Barang / Jasa di Desa
 - 7) Rakor Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)
 - 8) Raker Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se-Kalteng
 - 9) Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait Desa
 - 10) Penataan Administrasi Pemerintahan Desa se-Kalteng
 - 11) Pemantauan Pilkades Serentak
 - 12) Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se-Kalteng
 - 13) Pembelajaran Pengelolaan Keuangan dan Dana Desa

- Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - 1) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat bagi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Desa

- Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
 - 1) Pola Kemitraan TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD) dengan Masyarakat
 - 2) Pelaksanaan Gelar TTG
 - 3) Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Posyantek
 - 4) Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
 - 5) Peningkatan dan Pemanfaatan SDA di Kawasan Pesisir
 - 6) Peningkatan Peran Serta Generasi Muda Desa dan Hak Politik Dalam Ketahanan Masyarakat
 - 7) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kawasan Pedesaan

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA SKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
				Lokasi	Target	Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target
1	2		3	6	5		4	8	9	10
2.07.2.07.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun				3.190.756.400			3.190.756.400
2.07.2.07.1.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat		Kota Palangka Raya	12.715.000	12.715.000	APBD		12.715.000	12.715.000
2.07.2.07.1.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Palangka Raya	221.800.000	221.800.000	APBD		221.800.000	221.800.000
2.07.2.07.1.01.05		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Kota Palangka Raya	30.000.000	30.000.000	APBD		30.000.000	30.000.000
2.07.2.07.1.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Kota Palangka Raya	12.500.000	12.500.000	APBD		12.500.000	12.500.000
2.07.2.07.1.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset		Kota Palangka Raya	384.472.400	384.472.400	APBD		384.472.400	384.472.400

2.07.2.07.1.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	86.955.000	86.955.000	APBD		86.955.000	86.955.000
2.07.2.07.1.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	15.000.000	15.000.000	APBD		15.000.000	15.000.000
2.07.2.07.1.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	21.500.000	21.500.000	APBD		21.500.000	21.500.000
2.07.2.07.1.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	60.000.000	60.000.000	APBD		60.000.000	60.000.000
2.07.2.07.1.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	86.900.000	86.900.000	APBD		86.900.000	86.900.000
2.07.2.07.1.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	458.950.000	458.950.000	APBD		458.950.000	458.950.000
2.07.2.07.1.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Palangka Raya	150.000.000	150.000.000	APBD		150.000.000	150.000.000
2.07.2.07.1.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	31.500.000	31.500.000	APBD		31.500.000	31.500.000
2.07.2.07.1.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	60.000.000	60.000.000	APBD		60.000.000	60.000.000
2.07.2.07.1.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palangka Raya	365.428.000	365.428.000	APBD		365.428.000	365.428.000
2.07.2.07.1.01.19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Palangka Raya	400.000.000	400.000.000	APBD		400.000.000	400.000.000

2.07.2.07.1.01.23		Pembinaan Non PNS		Kota Palangka Raya	693.036.000	693.036.000	APBD		693.036.000	693.036.000
2.07.2.07.1.01.71		Pengembangan dan pengelolaan website kantor		Kota Palangka Raya	100.000.000	100.000.000	APBD		100.000.000	100.000.000
2.07.2.07.1.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan dan Prasarana Aparatur			413.968.700				413.968.700
2.07.2.07.1.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kota Palangka Raya	143.968.700	143.968.700	APBD		143.968.700	143.968.700
2.07.2.07.1.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kota Palangka Raya	150.000.000	150.000.000	APBD		150.000.000	150.000.000
2.07.2.07.1.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kota Palangka Raya	20.000.000	20.000.000	APBD		20.000.000	20.000.000
2.07.2.07.1.02.198		Penyebaran Data dan Informasi		Provinsi Kalteng	100.000.000	100.000.000	APBD		100.000.000	100.000.000
2.07.2.07.1.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun			245.390.000				245.390.000
2.07.2.07.1.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kota Palangka Raya	117.370.000	117.370.000	APBD		117.370.000	117.370.000
2.07.2.07.1.03.05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Kota Palangka Raya	128.020.000	128.020.000	APBD		128.020.000	128.020.000
2.07.2.07.1.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun			137.710.000				137.710.000
2.07.2.07.1.05.03		Bimbingan teknis implmentasi peraturan		Kota Palangka Raya	137.710.000	137.710.000	APBD		137.710.000	137.710.000

		perundang undangan							
2.07.2.07.1.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun			671.980.200			671.980.200
2.07.2.07.1.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kota Palangka Raya	5.350.000	5.350.000	APBD		5.350.000
2.07.2.07.1.06.02		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Kota Palangka Raya	13.904.000	13.904.000	APBD		13.904.000
2.07.2.07.1.06.04		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Kota Palangka Raya	13.284.600	13.284.600	APBD		13.284.600
2.07.2.07.1.06.06		Penyusunan RKA-SKPD		Kota Palangka Raya	56.000.000	56.000.000	APBD		56.000.000
2.07.2.07.1.06.14		Penyusunan LAKIP		Kota Palangka Raya	10.800.000	10.800.000	APBD		10.800.000
2.07.2.07.1.06.15		Penyusunan Renja SKPD		Kota Palangka Raya	25.000.000	25.000.000	APBD		25.000.000
2.07.2.07.1.06.33		Penyusunan laporan TEPPRA/SIMP3D		Kota Palangka Raya	43.000.000	43.000.000	APBD		43.000.000
2.07.2.07.1.06.89		Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa		Provinsi Kalimantan Tengah	437.641.600	437.641.600	APBD		437.641.600
2.07.2.07.1.06.90		Rapat kerja teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan		Kota Palangka Raya	67.000.000	67.000.000	APBD		67.000.000

		pemerintahan desa							
2.07.2.07.1.08		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran			106.117.000			106.117.000
2.07.2.07.1.08.01		Pengelolaan inventaris barang daerah		Kota Palangka Raya	106.117.000	106.117.000	APBD	106.117.000	106.117.000
2.07.2.07.1.15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			3.131.911.700			3.131.911.700
2.07.2.07.1.15.05		Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)		14 Kab/Kota	1.849.500.000	1.849.500.000	APBD	1.849.500.000	1.849.500.000
2.07.2.07.1.15.07		Lomba pokjnal posyandu		Kota Palangka Raya	194.000.000	194.000.000	APBD	194.000.000	194.000.000
2.07.2.07.1.15.08		Pelaksanaan PMT-AS		Provinsi Kalteng	80.000.000	80.000.000	APBD	80.000.000	80.000.000
2.07.2.07.1.15.09		Pelaksanaan profil desa/ kelurahan		Kota Palangka Raya dan 13 Kab.	76.500.000	76.500.000	APBD	76.500.000	76.500.000
2.07.2.07.1.15.13		Sosialisasi peletarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat		Kota Palangka Raya	30.000.000	30.000.000	APBD	30.000.000	30.000.000
2.07.2.07.1.15.20		Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan		Provinsi Kalimantan Tengah	701.911.700	701.911.700	APBD	701.911.700	701.911.700

2.07.2.07.1.15.21		Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)		Provinsi lain	200.000.000	200.000.000	APBD		200.000.000	200.000.000
2.07.2.07.1.16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro, serta Akses Modal Usaha bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat			1.327.500.000				1.327.500.000
2.07.2.07.1.16.10		Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan		Provinsi Kalimantan Tengah	85.000.000	85.000.000	APBD		85.000.000	85.000.000
2.07.2.07.1.16.11		Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)		Kota Palangka Raya	90.000.000	90.000.000	APBD		90.000.000	90.000.000
2.07.2.07.1.16.17		Pelaksanaan pameran		Provinsi Kalimantan Tengah	250.000.000	250.000.000	APBD		250.000.000	250.000.000
2.07.2.07.1.16.23		Pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga		Kota Palangka Raya	126.000.000	126.000.000	APBD		126.000.000	126.000.000
2.07.2.07.1.16.24		Pelatihan desa online		Kota Palangka Raya	102.000.000	102.000.000	APBD		102.000.000	102.000.000
2.07.2.07.1.16.25		Bimbingan teknis pengelolaan pasar desa		Kota Palangka Raya	118.000.000	118.000.000	APBD		118.000.000	118.000.000

2.07.2.07.1.16.26		Bimbingan teknis BUMDES		Kota Palangka Raya	125.000.000	125.000.000	APBD		125.000.000	125.000.000
2.07.2.07.1.16.27		Lomba pasar desa		Provinsi Kalimantan Tengah	106.500.000	106.500.000	APBD		106.500.000	106.500.000
2.07.2.07.1.16.28		Koordinasi konsultasi penguatan pasar desa		Provinsi Kalimantan Tengah, Prov lain	75.000.000	75.000.000	APBD		75.000.000	75.000.000
2.07.2.07.1.16.29		Rakernis Badan Usaha Milik Desa se Kalteng		Kota Palangka Raya	250.000.000	250.000.000	APBD		250.000.000	250.000.000
2.07.2.07.1.17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terciptanya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			1.899.600.000				1.899.600.000
2.07.2.07.1.17.06		Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan		Provinsi Kalimantan Tengah	1.035.000.000	1.035.000.000	APBD		1.035.000.000	1.035.000.000
2.07.2.07.1.17.08		Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat		Provinsi Kalimantan Tengah	512.600.000	512.600.000	APBD		512.600.000	512.600.000
2.07.2.07.1.17.20		Validasi data dan kodefikasi nama desa		Provinsi Kalimantan Tengah	44.400.000	44.400.000	APBD		44.400.000	44.400.000
2.07.2.07.1.17.21		Pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan dan musyawarah desa		Kota Palangka Raya	113.500.000	113.500.000	APBD		113.500.000	113.500.000

2.07.2.07.1.17.22		Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan		Kota Palangka Raya	194.100.000	194.100.000	APBD		194.100.000	194.100.000
2.07.2.07.1.18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			4.106.566.000				4.106.566.000
2.07.2.07.1.18.06		Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD		Provinsi Kalimantan Tengah	160.000.000	160.000.000	APBD		160.000.000	160.000.000
2.07.2.07.1.18.07		Monitoring penyaluran bantuan keuangan dan dana desa		Kota Palangka Raya	379.543.000	379.543.000	APBD		379.543.000	379.543.000
2.07.2.07.1.18.09		Pelatihan pemantapan tupoksi BPD		Kota Palangka Raya	126.000.000	126.000.000	APBD		126.000.000	126.000.000
2.07.2.07.1.18.11		Pelatihan Manajemen Keuangan dan Aset Desa		Provinsi Kalimantan Tengah	225.000.0000	225.000.0000	APBD		225.000.0000	225.000.0000
2.07.2.07.1.18.15		Sosialisasi Peraturan Mengenai Desa		Kota Palangka Raya	200.000.000	200.000.000	APBD		200.000.000	200.000.000
2.07.2.07.1.18.21		Rakor pembina teknis pemerintahan desa (PTPD)		Kota Palangka Raya	250.000.000	250.000.000	APBD		250.000.000	250.000.000
2.07.2.07.1.18.22		Raker penyelenggaraan pemerintahan desa		Kota Palangka Raya	1.791.023.000	1.791.023.000	APBD		1.791.023.000	1.791.023.000
2.07.2.07.1.18.23		Evaluasi rancangan peraturan bupati		Provinsi Kalimantan Tengah	100.000.000	100.000.000	APBD		100.000.000	100.000.000

2.07.2.07.1.18.24		Penataan administrasi pemerintahan desa		Provinsi Kalimantan Tengah	100.000.000	100.000.000	APBD		100.000.000	100.000.000
2.07.2.07.1.18.25		Pemantauan Pilkades serentak		Provinsi Kalimantan Tengah	100.000.000	100.000.000	APBD		100.000.000	100.000.000
2.07.2.07.1.18.27		Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa		Provinsi lain	100.000.000	100.000.000	APBD		100.000.000	100.000.000
2.07.2.07.1.18.28		Pembelajaran pengelolaan keuangan dan dana desa		Provinsi lain	350.000.000	350.000.000	APBD		350.000.000	350.000.000
2.07.2.07.1.19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Terciptanya Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			336.000.000		Kegiatan baru di luar renstra		336.000.000
2.07.2.07.1.19.04		Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa		Kota Palangka Raya	336.000.000	336.000.000	APBD		336.000.000	336.000.000
2.07.2.07.1.20		Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)			1.568.500.000		Kegiatan baru di luar renstra		1.568.500.000
2.07.2.07.1.20.01		Pola Kemitraan TNI Manunggal Masyarakat Desa		Provinsi Kalimantan	150.000.000	150.000.000	APBD		150.000.000	150.000.000

	(TMMD) dengan masyarakat		Tengah						
2.07.2.07.1.20.02	Pelaksanaan gelar TTG		Provinsi Lain	500.000.000	500.000.000	APBD		500.000.000	500.000.000
2.07.2.07.1.20.06	Pengembangan dan pematapan kelembagaan posyantek		Provinsi Kalimantan Tengah	110.000.000	110.000.000	APBD		110.000.000	110.000.000
2.07.2.07.1.20.08	Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa		Kota Palangka Raya	84.000.000	84.000.000	APBD		84.000.000	84.000.000
2.07.2.07.1.20.09	Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir		Kota Palangka Raya	100.000.000	100.000.000	APBD		100.000.000	100.000.000
2.07.2.07.1.20.22	Peningkatan peran serta generasi muda desa dan hak politik dalam ketahanan masyarakat		Kota Palangka Raya	560.000.000	560.000.000	APBD		560.000.000	560.000.000
2.07.2.07.1.20.23	Penguatan kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan		Kota Palangka Raya	64.500.000	64.500.000	APBD		64.500.000	64.500.000
	Jumlah				17.136.000.000				17.136.000.000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 yang didalamnya mengandung strategi dan arah kebijakan serta tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang dipakai sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HAMKA, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19660803 199301 1 001